

**PENGAWASAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF  
*FIQH SIYĀSAH***

**SKRIPSI**

Oleh

**Kurnia Nurma Aristawati**

**05040422086**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Nurma Aristawati  
NIM : 05040422086  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi  
Dalam Penegakkan Kode Etik Hakim Konstitusi  
Perspektif *Fiqh Siyasah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 08 Februari 2026

Yang menyatakan,



**Kurnia Nurma Aristawati**

Nim. 05040422086

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

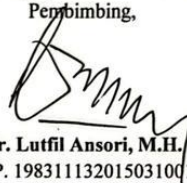
Nama : Kurnia Nurma Aristawati

NIM : 05040422086

Judul : Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakkan Kode Etik Hakim Konstitusi Perspektif *Fiqh Siyash*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 08 Februari 2026  
Pembimbing,



**Dr. Lutfil Ansori, M.H.**  
NIP. 198311132015031001

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Kurnia Nurma Aristawati

NIM. : 05040422086


Judul : Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengakuan Kode Etik Hakim Konstitusi Perspektif *Fiqh siyāsah*  
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

#### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
Dr. Lutfil Ansori, M.H.  
NIP. 1983111320150411001

Penguji II

  
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah,  
S.H.I., M.Si.  
NIP. 197911052007011019

Penguji III

  
Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.  
NIP. 198703152020121009

Penguji IV

  
Hürin Havati Alin, S.Hub.Int.,  
M.H.  
NIP. 199106012025052003

Surabaya, 27 Maret 2026

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Saifulrahman Musafirah, M.Ag.  
NIP. 196303271990032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kumia Nurma Aristawati

NIM : 05040422086

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail address : Kumianurma07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakkan Kode Etik Hakim Konstitusi

Perspektif Fiqh Siyasah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 April 2026

Penulis

( Kumia Nurma Aristawati )

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai *guardian of the constitution* yang menuntut integritas, independensi, dan moralitas tinggi dari setiap hakim konstitusi. Namun, munculnya pelanggaran kode etik hakim konstitusi, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melibatkan konflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, menimbulkan persoalan serius terkait pengawasan etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengawasan MKMK dalam menegakkan kode etik hakim konstitusi serta bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap pengawasan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi dan MKMK, serta literatur hukum dan *Fiqh Siyāsah* yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memiliki landasan hukum yang memadai, pelaksanaannya masih cenderung bersifat reaktif dan belum mengoptimalkan fungsi pencegahan dini terhadap pelanggaran kode etik hakim konstitusi dan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Secara normatif, MKMK telah menjalankan kewenangannya sesuai hukum positif, namun keberadaan hakim aktif dalam struktur MKMK menimbulkan dilema etis dan berpotensi mengurangi independensi pengawasan. Dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*, mekanisme tersebut sejalan dengan konsep *al-hisbah*, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pencegahan konflik kepentingan.

Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan independensi MKMK melalui penataan komposisi kelembagaan serta penguatan fungsi pengawasan preventif. Langkah tersebut penting untuk menjaga integritas hakim konstitusi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Hasil Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional .....	16
I. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL PENGAWASAN HAKIM</b> .....	<b>22</b>
A. Teori Pengawasan .....	22
B. Teori Sistem Hukum .....	29
C. Teori <i>Fiqh Siyāsah</i> Dustūriyyah .....	35
<b>BAB III PENGAWASAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN KODE ETIK</b> .....	<b>44</b>
A. Landasan Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi .....	44

B. Struktur Kelembagaan dan Kewenangan MKMK .....	48
C. Penegakan Kode Etik Oleh MKMK .....	54
D. Studi Kasus Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi.....	62
E. Implikasi Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi.....	66
<b>BAB IV ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI.....</b>	<b>70</b>
A. Etika Kepemimpinan Dalam <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	70
B. Penerapan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Pengawasan Hakim Konstitusi.....	75
C. Kesesuaian Mekanisme Pengawasan MKMK Dengan Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i> .	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	49
Tabel 2. Data Penanganan Perkara Kode Etik Oleh MKMK Tahun 2023-2025 .....	58



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Budi, Aji Setya, Retno Mawarini Sukmariningsih, dan Mochamad Riyanto. *Formulasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*. Penerbit Lawwana, 2025.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Anggriani, Jum. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Khaldun, Ibnu. *Muqodimah*. 2020. [http://archive.org/details/muqodimah\\_202008](http://archive.org/details/muqodimah_202008).
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Hisbah*. Dar al-Shab, 1976.
- Mawardi, Imam al-. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.
- Yarni, Meri. *Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Suatu Kajian Politik Hukum)*. Jl.Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu Pejaten Timur, Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.
- Musthafa, Syafrita Huspika, Rachmadi Usman., Thahir. Musa., Deris Arista Saputra., and Adnan Hasibuan. *Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Romly, Romly *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Deepublish, 2015.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Bumi Aksara, 2021.

Sulistiowati, dan Nurhasan Ismail. *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas*. UGM PRESS, 2023

**Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi:**

Abdullah, Asnawi, and Safriadi Safriadi. “Otoritas Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan: (Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh).” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (June 2022): 55–70. <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.477>.

Adinda Tenriangke Muchtar, Christina Clarissa Intania, Felia Primaresti. *Memetakan Pelanggaran Kebebasan Akademik Untuk Mendorong Kebijakan Perlindungan Kebebasan Akademik Di Perguruan Tinggi Di Indonesia*. Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat 10310: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), 2025.

Hakeem, Omar Rolihlahla, Flora Pricilla Kalalo, Tommy F. Sumakul, Administratum, Lex. *Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lex Administratum, no. 2.

Andria, Ghazian Muhtadi. “Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.” *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 2 (2023).

Antika, Dikeu, Fitriadi Pramono, dan Ricky Mubaroq. *Penyalahgunaan Wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019)*. n.d.

Arfiani, Ilhamdi Putra, dan Afdhal Fadhila. “Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (January 2024): 1234–48. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.436>.

Ariansyah, M. Rafi, and Rahmadani Yusran. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Publik.” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, December 15, 2020, 1–9. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i4.165>.

- Azzahra, Siti Nabilla. "Rekonsepsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi Perspektif Teori Sistem Hukum", 2023.
- Arifin, Fahmi Indra. "Pengaturan Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Universitas Sriwijaya, 2023.
- Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik dan Kualifikasi Calon Legislatif dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyash." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (January 2024). <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/657>.
- Fitriyani, Abd. Basir, Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep-Konsep Negara dalam Fiqih Siyash." *Farabi* 19, no. 1 (2022).
- Hamdi, Khairul, George Soros Setiawan Day. "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam Dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024).
- Rahman, Lingga Abi, Jeora Nitysa Aprily, Muhammad Faishal Fadhlurrahman, Nurul Nurul, Rani Komalasari, and Muhammad Luthfi Setiarno Putera. "Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (December 2024): 306–12. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.401>.
- Manembu, Michelli Pingky, Deine Rike Ringkuangan, and Meiske Mandey. "Penegakan Hukum Terhadap Hakim yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009." *Lex Asminiatratum* 12, no. 4 (2024).
- Deta, Melkianus Umbu, I Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)." *Student Research Journal* 2, no. 4 (July 2024): 47–77. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1353>.
- Mistam, Mistam, dan Fathul Maujud. "Prinsip-prinsip Pengawasan dalam Al-Qur'an dan Hadits: Implikasi terhadap Etika dan Kepemimpinan dalam Masyarakat

Muslim.” *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 02 (July 2025): 101–16. <https://doi.org/10.52593/pdg.06.2.06>.

Wulandari, Nengsih. “Keudukan Dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah.” 2022.

Al Fai’q, Nur Ahmad, Ahmad Faisal, Nur Fadillah, and Kurniati Kurniati. “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam.” *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 3 (June 2024): 64–77. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.403>.

Nurpratama, Meddy, and Agus Yudianto. “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Notaris/PPAT Maisarah Pane.,SH, Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Investasi* 7, no. 4 (September 2021): 60–74. <https://doi.org/10.31943/investasi.v7i4.158>.

Pamalingan, Muhammad Jumaidi, and Abd Halim Talli. *Penegakan Wilayah Al-Mazalim Pada Era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Ustmani*. 2, no. 1 (2025).

Rabawati, Dwityas Witarti, Jessica Eunike Lauwoie, Mathilda Karmenita, Eliza Rohi Mone, Sintya Sedni Nili, and Kelfin Eka Putra Banu. “Dampak Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keadilan dan Kepercayaan Publik.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9, no. 1 (January 2025).

Rafif, Muhammad, and Zakki Adlhiyati. *Tinjauan Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M.Friedman*. 2023.

Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi.” *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 2022): 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

Rasji, Lila Graciella Yuwono, and Meiliani. “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (April 2025): 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2369>.

- R, Rio, Mohamad Bagas. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (December 2021): 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.
- Riyah, Juwai. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara." *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 2 (April 2024): 76–85. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.52>.
- Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, and Muhammad Ferdy Hasan. *Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah*. 2, no 2 (2025).
- Rizman, Iksir Alkholy, Saipul Umami, and Riki Andika Putra. *Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*. 1, no. 1 (2025).
- Rosyidi, Muhammad. *Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. 4, no. 1 (2024).
- Bahri, Samsul. "Wilayatul Hisbah: Instrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Islam." 2024. <https://jurnal.stainusantara.ac.id/index.php/elf/article/view/107/74>.
- Sangaji, Ruslan, and Muh. Akbar Amnur. "Prinsip Syura Dalam Al-Qur'an dan Hadis Serta Penerapannya dalam Sistem Negara Modern (Suatu Analisis Siyasah Syar'iyah)." *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (December 2024). <https://doi.org/10.30863/alwajid.v5i2.5749>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Implikasi Mekanisme Seleksi terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2021): 112–38. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.
- Setiawan, Yuliantini, I. Made Aditya, Ni Made Ari. "Analisis Yuridis Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Menjaga Independensi, Integritas, Akuntabilitas Peradilan Berdasarkan UUD Tahun 1945." *Jurnal Kertha Desa* Vol 12 No 6 (2024).
- Simamora, Jonny, and Patricia Ekowati Suryaningsih. *Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik*. 23, no. 1 (2024).

- Julius, Tambok, Eka Putri Oktaviani, Puja Rianida, Ahmad Reihan Thoriq, Talitha Artha Shakira, Mulyadi. "Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Keabsahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (June 2025): 547–80. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15656086>.
- Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023)." *Iblam Law Review* 4, no. 2 (May 2024): 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.
- Tatoya, Deryl Estefanus Rivaldo Liuntuhaseng, Donald A. Rumokoy, and Donna Okthalia Setiabudhi. "Kajian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pelanggaran Etik Berat Oleh Hakim Konstitusi." *Lex Privatum* 15, no. 5 (May 2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61869>.
- Tobu, Engelbertus, Godeliva M. G. Mabilani, and Dwityas Witarti Rabawati. "Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi." *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no. 1 (January 2024): 78–87.
- . "Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi." *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no. 1 (January 2024): 78–87.
- Ulum, Hafizatul and Sukarno. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang di Tetapkan: (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)." *Unizar Law Review* 6, no. 2 (December 2023). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.
- Yushar, Mhd Faiz, and Harisman Harisman. "Kemandirian Dan Transparansi Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Indonesia Dan Thailand: Analisis Perbandingan Praktik Pengadilan." *Law Jurnal* 5, no. 1 (December 2024): 58–70. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5750>.
- Zamharira, Muin, Fahri nurdin, Fahmal, Bachmid. *Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ri Menurut UUD 1945*. 5 (n.d.).

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi

UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

### **Data Elektronik**

Aminulloh, Ali. “Kebijakan Pemimpin Berorientasi Masalah: Tashrrafu al-Imam 'Ala ar-Raiyyati manuthun bi al-maslahah (Seri belajar Qawaid Fiqhiyah).” *KOMPASIANA*, July 3, 2025. <https://www.kompasiana.com/aliaminulloh2036/68661a2ac925c405a3027da2/kebijakan-pemimpin-berorientasi-maslahah-tashrrafu-al-imam-ala-ar-raiyyati-manuthun-bi-al-maslahah-seri-belajar-qawaid-fiqhiyah>.

Lesmana, Teddy. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” *Nusa Putra University*, n.d. Accessed August 9, 2025. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

Firyalfatin, Firyalfatin. “Perpanjang Masa Tugas MKMK, Suhartoyo Tekankan Pentingnya Integritas Hakim.” *hukumonline.com*, July 1, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpanjang-masa-tugas-mkkm--suhartoyo-tekanan-pentingnya-integritas-hakim-lt695e12245396b/>.

Hukumonline, Tim. “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya.” hukumonline.com, March 28, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.

Humas MKRI. “MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.” In *Berita | Mahkamah Konstitusi*. 2023.

*Ini Dia Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Di Indonesia*. October 6, 2025. <https://iblam.ac.id/2025/10/06/ini-dia-tugas-dan-wewenang-komisi-yudisial-di-indonesia/>.

Abdulah, Nur Aina, and Ibnor Azli Ibrahim. “Kebebasan Kehakiman Istiqlal Al Qada Dal.” Accessed January 11, 2026. <https://text-id.123dok.com/document/yn4pm20z-kebebasan-kehakiman-istiqlal-al-qada-dal.html>.

Pengertian Pengawasan, Inspektorat Daerah.” March 4, 2025. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>.

Pujianti, Sri. “Masa Tugas Majelis Kehormatan Diperpanjang.” Mahkamah Konstitusi RI, February 1, 2025. <https://mkri.id/berita/masa-tugas-majelis-kehormatan-diperpanjang-21996>.

———. “MK Resmi Bentuk MKMK Permanen.” Mahkamah Konstitusi RI, December 20, 2023. <https://mkri.id/berita/mk-resmi-bentuk-mkkm-permanen-19882>.

Ziaggi. *Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenisnya*. n.d. Accessed February 3, 2026. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum/>.

Al-Qur’an, An-Nisa:58.